The Journalish: Social and Government

http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 1 Nomor 3 September 2020: TheJournalish Hal. 119-129

Politik Kekerabatan Dalam Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Politik Partai Nasdem Pada Pemilu 2019

Siti Zaetun¹, Chusnul Mariyah²

^{1,2}Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat Corresponding Author: ambu.etun@gmail.com

Abstrak: Gelombang besar gerakan perempuan di dunia selain menuntut hak dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga mendorong partisipasi keterwakilan perempuan dalam pembuatan keputusan. Literatur sebelumnya seringkali menganalisa keterwakilan perempuan berdasarkan hambatan kultural dan institusional tanpa spesifik memperlihatkan peran partai politik dalam melakukan aktivitas *gatekeeping* terutama dalam kandidasi perempuan. Artikel ini menggunakan teori rekrutmen politik dari Pippa Norris dengan metode analisis kualitatif deskriptif untuk menganalisa peningkatan keterwakilan perempuan dari Partai Nasdem para pemilihan umum serentak tahun 2019. Hasilnya (1) aturan-aturan pemilihan umum dan partai politik mempengaruhi peningkatan keterwakilan perempuan, (2) keterwakilan dan kepentingan perempuan belum menjadi kriteria utama dalam proses seleksi politik Partai Nasdem, (3) budaya survei dalam partimbangan kandidasi perempuan selain memberikan peluang terhadap calon perempuan juga menyuburkan politik kekerabatan, (4) komitmen Partai Nasdem terhadap keterwakilan dan kepentingan perempuan masih belum teruji, dan yang paling jelas adalah (5) sebagai komoditas politik dimana peningkatan wakil perempuan dengan latar belakang politik kekerabatan berkontribusi terhadap peningkatan suara Partai Nasdem dalam pemilu 2019.

Kata kunci; Gatekeeping; Keterwakilan Perempuan; Rekrutmen Politik; Pemilihan Umum; Politik Kekerabatan.

Abstract: The big wave of the women's movement in the world, apart from demanding rights and equality between men and women, also encourages women's representative participation in decision-making process. Previous studies often analyze women's representation based on cultural and institutional barriers without specifically showing the role of political parties in carrying out the gatekeeping activities, especially in women's candidacy. This article uses Pippa Norris' theory of political recruitment with descriptive qualitative analysis methods to analyze the increase in women's representation from Nasdem Party in the 2019 general elections. The results are (1) general election rules and political parties affect the increase in women's representation, (2) representation and women's interests have not become the main criteria in the political selection process of Nasdem Party, (3) the survey culture in the balancing of women's candidacy in addition to providing opportunities for female candidates also fostering kinship politics, (4) Nasdem's commitment to women's representation and interests is still untested, and the most obvious is (5) as a political commodity where an increase in the representation of women with kinship political backgrounds contributed to the increase in the votes of Nasdem Party in the 2019 elections.

Keywords: Gatekeeping; Women's Representative; Political Recruitment; General Elections; Kinship Politics.

Article History:

Received 25-08-2020; Revised 28-08-2020; Accepted 27-09-2020

PENDAHULUAN

Seiring dengan gelombang besar gerakan perempuan di dunia, literatur terkait perempuan dan politik mulai mengalami evolusi yang cukup signifikan setidak-tidaknya dalam 60 tahun terakhir. Dimulai dari tahun 1960/70-an dengan munculnya berbagai kritik dari kaum feminis diikuti dengan berbagai konferensi seminal terkait peranan perempuan. Isu yang paling banyak dibahas selain kesetaraan hak adalah representasi perempuan dalam politik yang selama 20 tahun terakhir semakin kompleks dengan ragam perspektif (insitusi, budaya dan sosial ekonomi). Perspektif insitutisional misalnya memfokuskan objek analisanya terhadap sifat sistem elektoral, kontruksi dan ukuran partai-partai politik, daftar calon partai, akses perempuan dalam pemilihan dan level demokrasi itu sendiri (Htun and Jones 2002; Krook 2005; Lindberg 2004; Matland and Studlar 1996). Selain itu perbedaan antara laki-laki perempuan dalam pehamanan konvensional tidak lagi dipandanga sekedar permasalahan ide tetapi juga terkait kehadiran dan representasi (Phillips 1995).

Keterlibatan perempuan dalam politik sejauh ini adalah dalam rangka mempromosikan dan memperjuangkan politik yang lebih ramah perempuan dalam sistem politik demokrasi yang sedang berjalan (Subono 2012). Bahkan sejumlah satuan-satuan atau komisi-komisi dibentuk dalam rangka mempromosikan kesetaraan perempuan. Hal itu karena menurut Phillips (1995) perempuan adalah aktor minoritas yang sesungguhnya. Penelitian terdahulu terkait keterwakilan perempuan telah banyak dikaji, misalnya para ilmuwan politik mencoba mengkombinasikan beragam faktor yang mempengaruhi keaktifan dan keterwakilan perempuan di politik, seperti faktor aturan elektoral elektoral dan sistem kepartaian (Lindberg 2004), faktor kultural dan kepercayaan (Tripp and Kang 2008), faktor pendidikan (Inglehart and Norris 2003), dan faktor ekonomi (Kenworthy and Malami 1999). Selain itu ada juga yang meneliti terkait peranan kuota perempuan dalam politik (Dahlerup 2013; Tripp and Kang 2008).

Kuota perempuan disebut juga dengan berbagai istilah seperti diskriminasi positif, *affirmative action*, *fast track policies*, dll dimaksudkan untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan dan menghadirkan representasi identitas perempuan secara kuantitas. Dalam hal ini kehadiran perempuan tidak dapat digantikan karena perempuan memiliki kelengkapan terbaik untuk mewakili kepentingan kaumnya (Phillips 1995). Pada kasus di Indonesia, kuota 30% perempuan di parlemen belum juga tercapai sejak pertama kali digunakan pada pemilu 2004. Di sisi lain, tersebut berdasarkan data Inter-Parliamentary Union (2020), Indonesia berada pada pringkat 104 untuk persentase perwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia, di bawah Kamboja (108), Philipina (62) dan Timur Leste (30). Meski demikian, hasil pemilihan umum serentak tahun 2019 menempatkan 120 wakil perempuan dari total 570 kursi yang tersedia atau 20,87%. Angka tersebut naik dibanding dengan pemilu sebelumnya tahun 2014 yang hanya menempatkan 97 perempuan di parlemen. Selain itu keterpilihan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI 2019-2024 merupakan sinyal positif bagi perempuan dalam politik.

Berdasarkan hasil rekapitulasi final pemilihan umum legislatif tahun 2019 menempatkan Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem) pada urutan ke-5 dengan perolehan suara 12.661.792 (9,05%) dibawah PDI-P (19,33%), Gerindra (12,57%), Golkar (12,31%) dan PKB (9,69%). Sebanyak 59 orang dari Partai Nasdem terpilih menjadi Anggota DPR RI 2019-2024 atau naik dari periode sebelumnya yang hanya mendapatkan 35 kursi dari total 576 anggota DPR RI secara keseluruhan. Meskipun berada pada urutan ke-5, Partai Nasdem justru merupakan partai yang mendapatkan kenaikan suara terbesar dibandingkan partai yang lain yakni 2,33% dari pemilu sebelumnya tahun 2014. Selain itu Partai Nasdem juga berhasil melampaui keterwakilan perempuan di parlemen sebagaimana amanat undang-undang. Sebanyak 19 orang dari Partai Nasdem terpilih menjadi anggota DPR RI tahun 2019-2024 atau sebesar 32% dari total 59 orang kader Nasdem yang terpilih. Dibandingkan perolehan tahun 2014, hanya ada empat orang wakil perempuan dari total 35 orang wakil Partai Nasdem di DPR RI, yaitu: Irma Suryani, Amelia Anggraini, Yayuk Sri Rahayuningsih, Tri Murny. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia.

Peningkatan keterwakilan perempuan dari Partai Nasdem pada pemilu terakhir tidak begitu saja terjadi secara alamiah. Fenomena politik seringkali dirancang oleh berbagai aktor yang berperan sebelumnya. Pencapaian Partai Nasdem tidak bisa dilepaskan dari strategi dan komitmen partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Selain itu, sebagaimana Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 11 ayat 1 (e) partai politik berfungsi sebagai sarana "rekruitmen politik

dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender". Hal ini sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 65 ayat 1 yang mendorong partai politik untuk memenuhi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Dengan demikian peningkatan keterwakilan perempuan dari Partai Nasdem dapat dilihat dari aktivitas *gatekeeping* terutama proses kandidasi atau rekrutmen politik. Menurut Norris dan Lovenduski (1995:123-142) diskriminasi perempuan dapat dilihat dari pola rekrutmen partai politik terutama pada perilaku tim penyeleksi.

Sejauh ini litaratur terkait representasi politik perempuan di Indonesia tidak banyak melihat proses rekrutmen politik yang terjadi dalam kandidasi perempuan dan lebih melihat dari perspektif perempuan ataupun regulasi secara makro (Dewi 2014; Maria, Quintarti, and Djou 2018; Soetjipto 2005). Begitupun dengan literatur terkait rekrutmen politik tidak fokus memperlihatkan hubungan antara kandidasi dan keterwakilan perempuan (Rizki 2017; Soetomo 2004), atau ada yang membahas terkait kandidasi namun bukan pada Partai Nasdem (Tuasuun 2015). Penelitian ini akan menganalisa strategi rekrutmen politik calon anggota parlemen perempuan dari partai Nasdem di Indonesia dengan menggunakan teori rekrutmen politik serta komitmen Partai Nasdem dalam meningkatkan keterpilihan calon perempuan dan memperjuangkan kepentingan perempuan di parlemen.

Proses rekrutmen dalam partai politik berkaitan dengan upaya partai untuk mengorganisasikan diri, yang kemudian oleh Norris dalam Katz dan Crotty (2006:89) diidentifikasi kedalam empat hal, yaitu: siapa kandidat yang dapat dinominasikan (candidacy)?, siapa yang menyeleksi (selectorate)?, dimana kandidat diseleksi? serta bagaimana kandidat diputuskan?. Secara keseluruhan empat poin tersebut dapat dikatakan merupakan satu rangkaian proses partai sebelum mengusung calon. Maka keempat hal tersebut menjadi satu rangkaian yang tak dapat dipisahkan sebagai wujud melahirkan kandidat yang berkualitas. Adapun kualitas kandidat ditentukan oleh baik dan buruknya proses rekrutmen. Menurut Pippa Norris, proses rekrutmen yang baik didasarkan pada prestasi dan riwayat kandidat sedangkan proses rekrutmen yang buruk didasarkan pada hubungan personal antara kandidat dengan partai politik. Dengan demikian, untuk menganalisa proses rekrutmen tersebut, Pippa Norris (1997) membaginya dalam empat level analisis, yaitu: (1) analisis pada level sistem politik yang terdiri dari sistem hukum, sistem pemilu dan sistem kepartaian; (2) proses rekrutmen yang menganisis demokrasi internal partai; (3) analisis terhadap para kandidat, dan; (4) level analisis pada selektor.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan sebagai upaya menjawab permasalahan penelitian, terutama terkait dengan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif, menurut Neuman (2006:44), menyajikan gambaran yang spesifik mengenai situasi, penataan sosial atau hubungan. Data primer dalam artikel ini berupa wawancara dengan empat responden yaitu: Willy Aditya (Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatra Partai Nasdem), Amelia Anggraeni (Anggota DPR RI Fraksi Nasdem 2014-2019) dan Lisa Hendrajoni (Anggota DPR RI Fraksi Nasdem 2019-2024). Selain itu data sekunder diperoleh dari studi literatur yang dapat membantu penulis untuk menguatkan argumen dalam artikel ini, seperti: dokumen pemerintah, hasil riset sebelumnya yang terkait dengan topik dan pemberitaan media massa *online*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Politik

Level pertama dalam analisis rekruitmen politik Pippa Norris (1997) adalah menganalisa sistem politik, sistem elektoral dan sistem kepartaian. Ketiganya tidak dapat dipisahkan, hubungan kausal antara ketiganya seringkali menjadi perhatian banyak ilmuwan politik (Duverger and Duverger 1972; Scott, Warr, and Sartori 1977; Supriyanto and Mellaz 2011). Terutama rekayasa pemilihan umum (electoral engineering) pada dasarnya berperan besar dalam memfasilitasi perubahan rezim pada dekade-dekade terakhir untuk menjadi lebih demokratis.

Kontitusi Indonesia sejak awal menganut sistem presidensialism (pasal 4 UUD 1945) yang kembali ditegaskan melalui amandemen I s/d IV UUD 1945 pasca reformasi tahun 1998. Amandemen dilakukan karena pada praktiknya sistem politik presidensialism di Indonesia mengalami sejumlah

masalah, misalnya praktek pada masa Orde Lama justru bersifat Parlementer yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri saat itu, membuat Kedudukan lembaga eksekutif sangat dipengaruhi oleh lembaga legislatif. Adapun seiring terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dimulai Demokrasi Terpimpin, dimana peranan lembaga eksekutif jauh lebih kuat (*president-heavy*) bila dibandingkan dengan peranannya di masa sebelumnya (Haris 2014). Begitupun pada masa Orde Baru praktik presidensialisme juga bermasalah karena tidak memiliki batasan periode dan minimnya peran pengawasan legislatif terhadap eksekutif.

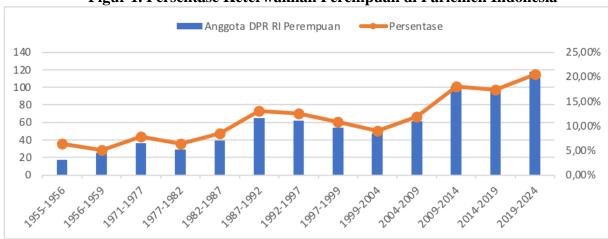
Perbedaan sistem politik sebuah negara sangat bermakna, misalnya para ilmuwan menganggap bahwa sistem presidensialisme cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih terbuka, membutuhkan pendanaan yang lebih besar dan akan lebih baik diterapkan dalam sistem representatif (Cheibub 2006; Pak 1995) namun juga seringkali menimbulkan konflik atau bahkan dalam kasus tertentu menyebabkan kegagalan demokrasi (Linz 1994). Sedangkan sistem parlementer, pemerintahan dianggap lebih stabil dan partai-partai politik efektif menangani masalah-masalah kolektif (Aldrich 1995). Adapun sistem pemilihan umum di Indonesia menggunakan sistem proporsional (PR) dengan variasi Daftar PR.

Sistem kepartaian sendiri merupakan sistem interaksi antar partai politik (Scott et al. 1977). Dengan demikian setiap perubahan dalam aturan elektoral direspon dan bahkan telah diantisipasi oleh masing-masing partai sehingga menyebabkan dinamika antar partai politik. Kaitan lainnya yakni antara rekayasa pemilu dengan sistem kepartaian dijelaskan dengan detail melalui Hukum Duverger (Duverger Laws). Menurutnya terdapat efek mekanis dan efek psikologis dalam aturan-aturan pemilu. Efek mekanis menegaskan kurang terwakilinya partai ketiga (partai baru atau partai kecil) karena aturan-aturan seperti ambang batas (threshold). Efek mekanis ini kemudian mempengaruhi para pemilih yang mendukung partai kecil/partai baru yang secara psikologis terdorong untuk tidak menyianyiakan suara mereka hingga pada akhirnya terpaksa memilih partai besar yang berpotensi lolos pemilu (Bachtiar, Bolqiah, and Andrean 2020). Adapun untuk melihat pengaruh aturan-aturan pemilu dan partai politik terhadap keterwakilan perempuan di mulai dengan melihat perkembangan aksi afirmasi perempuan sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Aksi Afirmasi dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik

| | UU Pemilihan Umum | UU Partai Politik | |
|--------------------|--|--------------------|--|
| Perkembangan UU | Kandungan Aksi Afirmasi | Perkembangan UU | Kandungan Aksi Afirmasi |
| UU 3/1999 | Belum ada aksi afirmasi. | | |
| UU 12/2003 | Ada aksi afirmasi, terbatas pada kuota 30% untuk pencalonan perempuan dalam Pemilu. Namun sifatnya adalah rekomendasi terhadap partai politik untuk mempertimbangkan minimal 30% keterwakilan perempuan. | UU 31/2002 | Belum ada aksi afirmasi, namun sudah ada pertimbangan diperlukannya aspek kesetaraan gender. |
| UU 10/2008 | Ada aksi afirmasi, diantaranya: • Ketentuan partai peserta pemilu menyertakan 30% pengurus perempuan di tingkat Pusat. • 30% untuk pencalonan perempuan dalam pemilu, dengan sanksi administratif tidak mengikat. • Sistem semi-zipper, yakni minimal 1 perempuan diantara 3 calon legislatif dalam daftar, dengan tanpa sanksi. | UU 2/2008 | Ada aksi afirmasi, terbatas pada ketentuan kuota 30% untuk pendirian partai baru dan kepengurusan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota. Sanksi administratif diberikan bagi partai yang baru mendaftarkan diri sebagai badan hukum |
| UU 8/2012 | Ada aksi afirmasi, menanggapi Mou No.14 / MPP-PA / 07/2012 dalam rangka pengarusutamaan percepatan gender, sistem zipper dipertahankan, parpol harus menunjukan 30% keterwakilan perempuan di dewan eksekutif nasional partai. | | |

Selain aturan-aturan di atas, penulis juga menyoroti adanya peran perubahan variasi sistem pemilu dari daftar PR tertutup menjadi terbuka sejak pemilu 2009 memberikan peluang terhadap keterpilihan calon perempuan atau setidak-tidaknya meminimalisir diskriminasi partai politik terhadap calon perempuan, lihat tabel berikut:



Figur 1. Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia

Berdasarkan tabel di ats terlihat kenaikan wakil perempuan di DPR RI yang cukup tinggi pada peride 2009-2014 yaitu 101 orang (18,3%) dibandingkan periode sebelumnya 2004-2009 yaitu 61 orang (11,9%). Kenaikan saat itu merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah keterpilihan perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia yakni 6,4%. Berbeda dengan literatur sebelumnya yang memandang tiddak adanya pengarusutamaan gender pada partai-partai politik atau dengan kata lain perempuan tetap harus berjuang sendiri (Maria et al. 2018; Soetjipto and Adelina 2012), sebaliknya penulis justru melihat adanya pengaruh dari perubahan aturan-aturan pemilu dan partai politik terhadap keterwakilan perempuan di Indonesia.

Proses Rekruitmen

Proses rekrutmen dipengaruhi oleh tiga faktor yakni organisasi, aturan dan budaya. Partai politik akan membentuk semacam badan khusus pemenangan untuk melakukan proses rekrutmen seperti Bappilu dalam konteks partai Nasdem. Kemudian sejumlah aturan dan prosedur ditetapkan, sebagai contoh beberapa partai politik menggunakan rekrutmen tertutup hanya untuk kader sedangkan partai lain membuka kemungkinan bagi kandidat yang berasal dari luar partai. Budaya juga menjadi faktor penting bagi Norris mengadakan konvensi, melibatkan relawan atau masyarakat, media bahkan lembaga survei.

Partai Nasdem misalnya sejak awal memang memperlakukan rekrutmen calon perempuan dengan cara yang berbeda, misalnya khusus untuk rekrutmen calon perempuan DPR RI langsung ditangani oleh DPP sebagai supervisor, sedangkan rekrutmen calon laki-laki DPR RI dilakukan oleh Komando Pemenangan Wilayah dan Bappilu Wilayah. Berikut alur rekrutmen Partai Nasdem:

Tabel 2. Jadwal Pencalegan DPR RI Partai Nasdem

| | Tabel 2: Saawai I chealegan DI K Ki I ai tai Tabachi | | | |
|----|--|---|--|--|
| No | Bulan/Tanggal | Keterangan | | |
| 1 | Mei | Pelatihan Silon oleh KPU | | |
| | | Melengkapi Struktur Bappilu | | |
| 2 | 21 Mei | Batas akhir pengajuan Bacaleg DPR RI dari DPD dan DPW | | |
| 3 | 4-8 Juni | Pleno BAPPILU Pusat terkait Bacaleg DPR RI | | |
| 4 | 9-13 Juni | SK DPP untuk Caleg DPR RI | | |
| 5 | 18-29 Juni | Kelengkapan dokumen Caleg DPR RI sesuai persyaratan | | |
| 6 | 30 Juni – 3 Juli | Proses input Offline SK DCS DPR RI oleh Bappilu Pusat | | |
| 7 | 4 Juli | Pendaftaram DCS ke KPU | | |

Sumber: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem

Berdasarkan tabel di atas, umumnya tahapan rekrutmen calon legislatif partai Nasdem dimulai dari pengajuan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari Bappilu Wilayah namun Menurut Martin Manurung, "strategi rekrutmen calon perempuan langsung oleh Bappilu Pusat ternyata membuahkan hasil sebagaimana yang sekarang kita lihat pada peningkatan wakil perempuan dari Nasdem". Artinya terdapat strategi khusus dalam merekrut calon perempuan dari Partai Nasdem. Senada dengan itu, terdapat perlakuan yang berbeda untuk sejumlah canlon/kandidat misalnya dalam kasus Lisda Hendrajoni. Bukan Lisda yang mendaftar dan mengikuti rekruitmen tetapi justru Partai Nasdem menjemput Lisda, sebagaimana keterangan dari Lisda, "orang-orang Nasdem, petinggi-petinggi Nasdem itu menghargai kita, menjemput kita, sehingga mereka bisa meyakinkan, kenapa kami memilih ibu, karena begini-begini... dan ternyata mereka telah ada survey, dan pada waktu itu saya diinfo kalau memang hasil survey saya tertinggi".

Hal yang sama diungkapkan salah satu anggota Bappilu partai Nasdem, Willy Aditya, "Salah satu pegangan kami dalam mengikuti kontestasi politik 2019 kemarin didasarkan pada hasil survei". Adapun partai Nasdem menggunakan lembaga survei profesional atau diluar partai politik yakni Indikator. Selain itu menurutnya, metode yang digunakan untuk menyeleksi beragam, dari mulai wawancara sampai penelusuran rekam jejak, bahkan setelah itu calon-calon yang terpilih dibekali pelatihan/pembobotan. Adapun pada pemilihan umum legislatif tahun 2019, dari 575 orang calon Partai Nasdem diantaranya 220 orang perempuan dan 355 laki-laki atau dengan kata lain persentasi calon perempuan partai Nasdem adalah 38,36% melebihi kuota 30% yang diamanatkan undanundang.

Keterlibatan lembaga survei dalam rekruitmen partai politik juga merupakan hal yang cukup baru dewasa ini, terutama di Indonesia. Pasalnya para ilmuwan biasanya menemukan bahwa aktivitas gatekeeping atau kontrol proses nominasi oleh partai politik berpengaruh negatif terhadap kandidasi perempuan (Burell 1993; Sanbonmatsu 2010). Selain gatekeeping, para ilmuwan juga memandang tantangan lainnya bagi perempuan untuk terlibat dalam politik adalah karena pendidikan dan segregasi tempat kerja (Verba, Burns, and Schlozman 2001), pengetahuan politik (Mondak and Anderson 2004), persepsi diri kandidat (Lawless and Fox 2005) dan kesulitan mendapatkan dana kampanye (Lawless 2009). Faktor-faktor tersebut pada dasarnya mesti diuji ulang karena peranan lembaga survei mengutamaka faktor elektabilitas dan popularitas kandidat, adapun proses seperti wawancara, penelusuran jejak dan yang lainnya hanya menjadi sumber sekunder dalam proses rekrutmen partai politik.

Tuntutan Selektor

Tahap berikutnya, *Selector demand* yaitu sikap dari penyeleksi yang didasarkan pada kriteria yang dibutuhkan oleh partai politik. Norris mencontohkan sejumlah partai di berbagai negara seringkali memilih pengusaha sebagai kriteria kandidat untuk dipilih. Namun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan modifikasi berdasarkan pada pandangan Barbara Gaddes (1966:142–81) tentang 4 model rekruitmen untuk menjelaskan sikap dari penyeleksi (*selector*), yakni: *partisipanship*, berdasarkan pertimbangan loyalitas terhadap partai politik; *meritocratic*, berdasarkan pada kompetensi yang tinggi seperti pengusaha, teknokrat, guru dan pekerja ahli; *compertementalization*, dilakukan atas dasar pertimbangan pragmatis dan jangka pendek, dan; *survival*, didasarkan pada prinsip balas jasa dan sumber daya pelamar yang cenderung bersifat patronase.

Selektor rekruitmen politik Partai Nasdem langsung dipegang oleh Bapilu yang dipimpin oleh Jeanette Sudjanadi (Ibu Jes), bukan panelis atau profesional ahli. Dengan kata lain segala urusan terkait seleksi merupakan tanggung jawab bappilu. Selektor atau dalam hal ini Bappilu biasanya menyelenggarakan *one on one interview* untuk menanyakan sejumlah pertanyaan seperti modal finasial, modal sosial atau investasi sosial yang selama ini dimiliki kandidat, target suara di setiap tempat serta motivasi caleg untuk maju. Dalam sesi wawancara, bappilu juga bertanya terkait bentuk bantuan dari partai yang akan dibutuhkan oleh caleg dalam kontestasi pemilu.

Kriteria nasdem, menurut Willy sangat sederhana dan tegas yakni "jelas keberpihakannya". Nasdem menurutnya mementingkan loyalitas, soal kecakapan bukan yang utama karena hal itu bisa dicitrakan, dipoles atau diapgrade. Sedangkan untuk keberpihakan, menurutnya membutuhkan komitmen yang jelas dari seorang politisi. Keberpihakan yang dimaksud adalah keberpihakan terhadap isu perempuan dan partai, namun yang paling utama adalah komitmennya terhadap partai Nasdem. Meskipun demikian penulis tidak dapat mengkategorikan model selektor rekrutmen Partai Nasdem sebagai partisipansip dikarenakan pengakuan Willy yang memandang pentingnya partai Nasdem untuk dapat bersaing dengan partai lain di pemilihan umum berikut juga peranan lembaga

survei yang dominan dalam proses rekrutmen menunjukan pragmatisme Partai Nasdem dalam kontestasi pemilihan umum. Nasdem tidak membedakan kader partai atau bukan, yang terpenting kandidat dapat menarik pemilih. Jadi alih-alih partisipansip justru hal itu menunjukan model *compertementalization*. Misalnya dari 575 orang calon dari Partai Nasdem pada Pileg 2019, 50 orang diantaranya inkumen, 35 dari internal dan 15 pindahan dari partai lain ke Nasdem. Angka calon pindahan ke partai Nasdem merupakan yang tertinggi dibanding partai lainnya.

Modal dan Motivasi Kandidat

Terakhir, *candidate supply* meliputi modal politik dan motivasi. Diantaranya modal politik adalah jaringan politik, pengalaman berpartai, fleksibilitas karir, kualifikasi pendidikan dan skill legislatif. Sedangkan motivasi yang mendasari kandidat untuk ikut serta bisa berasal dari tradisi keluarga, ambisi politik pribadi, keinginan untuk menjadi pemimpin partai dan dukungan dari komunitas atau masyarakat sekitar.

Rata-rata calon perempuan dari partai Nasdem tidak memiliki latar belakang ikut serta di partai politik lain sebelumnya, atau dengan kata lain Partai Nasdem merupakan partai politik pertama bagi para calon perempuan meskipun ada juga yang sebelumnya pernah di partai politik seperti Sri Wulan dari Partai Nasdem dan Eva Yuliana dari Partai Demokrat. Terkait modal pencalonan pada dasarnya baik Rusnah, Lisda maupun Amelia dan mungkin yang lainnya (jika ditanya) menjawab modal sosial dan minim modal capital. Namun meski demikian 13 orang calon terpilih perempuan dari partai Nasdem memiliki kekerabatan politik dengan pejabat lokal baik anak, istri maupun menantu.

Tabel II. Latar Belakang Politik Calon Perempuan Terpilih Partai Nasdem

| No | Nama | Latar Belakang |
|----|----------------------|---|
| 1 | Sri Wahyuni | Istri Bupati Ponorogo (Ipong Muchlissoni) |
| 2 | Sri Kustina | Istri Bupati Pali (Heri Amaliando) |
| 3 | Lisda Hendra Johni | Istri Bupati Pesisir Selatan (Hendrajoni) |
| 4 | Delmeria Sikumbang | Istri Walikota Sibolga |
| 5 | H Hasnah Syam | Istri Bupati Barru (suardi Saleh) |
| 6 | Eva Rataba | Istri Wakil Bupati Toraja Utara (Yosia Rinto) |
| 7 | Tina Nur Alam | Istri Mantan Gubernur Sulawesi Utara (Nur Alam) |
| 8 | Hillary Bigita Lasut | Anak Bupati Talaud (Elly Lasut) |
| 9 | Yessie Melanie | Menantu Bupati Melawi (Panji) |
| 10 | Kristiana Mukti Spd | Istri Bupati TTU (Raymundus Fernandes) |
| 11 | Ratu Ngadu Bonu | Istri Mantan Bupati Sumba Barat Daya (Markus Dairu Talo) |
| 12 | Ari Eghani | Istri Bupati Kapuas (Ben Ibrahim S Bahat) |
| 13 | Percha Leanpuri | Anak Gubernur Sumatra Selatan Periode 2018-2013 (Herman Deru) |

Sumber: berdasarkan profil masing-masing kandidat.

Selain 13 orang diatas. 6 orang sisanya yang juga terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem berasal dari berbagai latar belakang misalnya dari kalangan pengusaha (lestari Moerdijat, Ratih Megasari), DPR RI Periode sebelumnya (Sri Wulan) dan DPRD (Eva Yuliana, Felly Runtuwene). Pada pemilu serentak 2019, 19 orang perempuan yang terpilih menyumbang sebanyak 1.636.795 atau 12,9% dari total suara Partai Nasdem.

Saat ditanya terkait banyaknya calon berlatar belakang politik kekeluargaan, Willy tidak menolak hal itu karena partai Nasdem adalah partai yang baru dan bagaimanapun harus bersaing dengan partai lama maka tidak ada pilihan selain mendapatkan calon yang memiliki basis pemilih yang loyal. Oleh karenanyam dalam menyeleksi kandidat partai Nasdem jelas-jelas melihat latar belakang ketokohan dan kapasitas *vote getter* dari seorang kandidat/caleg. Senada dengan Willy, menurut Amelia tidak semua calon dengan latar belakang dinasti tersebut memiliki konstituen, integritas dan kapasitas. Di sisi lain Nasdem juga banyak mencalonkan selebritis, namun menurutnya syarat utama adalah kapabilitas dan kapasitas serta memiliki niat untuk mengabdi (integritas).

Senada dengan itu, Lisa Hendrajoni juga tidak menampik bahwa latar belakangnya sebagai istri bupati berpengaruh terhadap pencalonannya namun menurutnya hal itu bukan faktor utama karena banyak juga istri kepala daerah yang mencalonkan diri namun tidak banyak yang terpilih, "jadi itu merupakan salah satu faktor penting tapi bukan satu-satunya dan mungkin yg utama,". Lisa juga mengungkapkan biaya pencalonan yang menurutnya tidak sedikit, minimal 5 Miliyar. Di dalam wawancara Lisa menggambarkan contoh pemasangan baliho disetiap kecamata dan desa-desa. di

daerah pemilihannya, Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 15 kecamata, 182 desa dimana 1 desa dipasang minimal 5 baliho. Selain kunjungan dari sqatu desa ke desa lain dengan tim dan membawa souvenir berikut kebutuhan makan, bensi, rokok, snack, vitamin, penginapan, dll. Ilustrasi tersebut juga disampaikan Amalia, meskipun dirinya incumbent namun pada pemilu 2019 tetap mengeluarkan modal capital yang banyak, lebih dari 5 Miliyar menurutnya. Oleh karena itu selain modal sosial, modal capital sangatlah penting sebagai kriteria calon yang akan dipilih oleh partai Nasdem.

Strategi dan Komitmen Partai Nasdem terhadap Kepentingan Perempuan

Dalam melakukan rekruitmen politik, Partai Nasdem mengusung tagline "politik tanpa mahar". Kesaksian tersebut disampaikan Lisda, "ada satu hal yang membuat saya jatuh hati dengan Nasdem soal anti mahar gitu. Dan kami adalah orang yang menjadi saksi bahwa itu betul, jadi kita kan udah keliling-keliling ya". Menurutnya partai Nasdem juga merupakan satu-satunya partai yang tidak membicarakan soal uang sepeserpun, bahkan menurut pengakuan Lisda partai Nasdem malah menolak pemberiannya. Senada dengan Lisda, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga mengampaikan bahwa, "Selama satu tahun menjalani proses perjodohan politik, saya sampaikan kesaksian. Partai Nasdem betul-betul melakukan politik tanpa mahar" (Anggoro 2018). Selain itu, dalam persoalan calon perempuan tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) Partai Nasdem Pasal 20 tentang Keterwakilan Perempuan dalam struktur internal partai.

Selain itu ada beberapa strategi rekrutmen yang digunakan oleh Partai Nasdem seperti menyusun daftar Bacaleg jauh sebelum pemilihan umum mulai dengan "Indonesia Memanggil" yang di laksanakan 1,5 tahun sebelum pemilu. Kemudian Partai Nasdem juga menurut Amelia tetap komitmen terhadap calon yang dipilihnya meskipun gagal namun Partai Nasdem tidak akan meninggalkannya melainkan mencari posisi yang lain untuk ditempati. Amelia mencontohkan Siti Nurbaya yang gagal mendapatkan kursi di Dapil Lampung namun ditempatkan sebagai menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal itu dilakukan menurutnya agar mendapat loyalitas anggota Partai Nasdem. Hasil strategi dan komitmen tersebut, Partai Nasdem berhasil menempatkan 19 wakil perempuannya di DPR RI. Tidak hanya menjalankan amanat konstitusi dalam kesetaraan gender, suara total Partai Nasdem juga diuntungkan oleh sumbangan suara dari para wakil perempuannya. Oleh karena itu keterwakilan politik perempuan dalam hal ini sangat berpengaruh bagi partai politik Nasdem, setidaknya dalam hal kuantitas atau representasi formalistik (formalistic representation).

Adapun komitmen Partai Nasdem terhadap kepentingan perempuan juga diimplementasikan mulai dari pendidikan politik setelah calon perempuan terpilih sampai dengan mensupport sejumlah kebijakan terkait kepentingan perempuan. Misalnya dalam hal oendidikan politik, ketika calon dari partai Nasdem terpilih, menurut keterangan Amelia, mereka akan disekolahkan atau mengikuti pelatihan terkait legislasi, "mulai dari merumuskan dan menginventarisir masalah, kemudian masuk menjadi tim *musdan*, kemudian masuk tim perumus dan tim sinkronisasi itu mereka dilatih. Kemudian bagaimana mereka berhadapan dengan media, ketika mereka sudah ngomong di luar kemudian mereka di door stop itu mereka harus ngomong apa".

Kemudian contoh kebijakan yang diperjuangkan oleh wakil perempuan dari Partai Nasdem adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Lisa Hendrajoni menggambarkan pentingnya wakil perempuan dalam pembahasan karena anggota DPR RI laki-laki seringkali tidak serius dalam diskusi, "misalnya mulai dari judul ya kata-kata kekerasan ya, katanya gini "bukannya perempuan suka yang keras-keras?" okelah kalau saat kita becanda gapapa, kita juga becanda begitu juga biasa aja. Tetapi jangan dijadiin bahas diskusi terus itu dijadiin bahasan gitu loh". Selain itu Lisa juga memaparkan terkait pemerkosaan dalam rumah tangga yang menurutnya laki-laki tidak bisa membedakan antara pemerkosaan dengan berhubungan badan.

Menurut Menurut Hannah Pitkin dalam Arnesen & Peters (2018:209) representasi artinya "bertindak sesuai kepentingan yang diwakili". Dalam kasus ini 19 orang yang terpilih berperan dalam mewakili kepentingan perempuan. Sementara yang dimaksud dengan "kepentingan perempuan" menurut Molyneux (2004) terdapat tiga konsep yakni kepentingan perempuan (women interest), kepentingan gender strategis (strategic gender interest) dan kepentingan gender praktis (political gender interest). Berdasarkan konsep demikian, masing-masing perempuan yang terlibat dalam partai politik memiliki beragam kepentingan. Senada dengan itu, menurut Anne Philips (1995) kepentingan perempuan juga sangat kontekstual, artinya berbeda-beda dan tidak homogen. Heterogenitas kepentingan perempuan juga diakui oleh Lisa, menurutnya 4 orang perempuan dari 11 anggota komisi VIII masing-masing mewakili kepentingan partainya dan meskipun dirinya perempuan namun apabila partainya menolak RUU PKS maka dirinya pun akan menolaknya.

Tantangan Keterwakilan Perempuan

Dibalik tingginya capaian keterwakilan perempuan dari partai Nasdem justru terdapat masalah dalam rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa strategi yang dilakukan partai Nasdem dalam merekerut calon perempuan terbilang berhasil berikut dengan komitmen partai dan wakil perempuan Nasdem di DPR RI sejauh ini cukup konsisten, namun fakta terkait latar belakang wakil perempuan Nasdem yang didominasi politik kekerabatan tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Bahkan hal itu diakui sebagai bagian dari strategi Partai Nasdem agar dapat berkompetisi dengan partai-partai yang sudah lama berdiri. Disamping itu sebagai partai baru, Nasdem juga menuntut loyalitas dari anggotanya sebagai kriteria utama dalam proses kandidasi. Konsekuensinya, meskipun dalam kebijakan RUU PKS Nasdem secara terang-terangan memperjuangkan kepentingan perempuan namun hal itu belum teruji seandainya kepentingan partai Nasdem berbeda dengan kepentingan perempuan.

Disisi lain, budaya survei selain membuka peluang kandidasi perempuan, juga memberikan peluang terhadap politik kekerabatan terutama istri dan anak pejabat yang lebih dulu dikenal publik. Selain itu modal capital juga tetap menjadi penting dalam pertimbangan selector khususnya pada partai Nasdem. Meskipun sebenarnya politik kekerabatan bukanlah permasalahan apabila prosedur rekruitmen yang dilakukan sudah sesuai. Dalam hal ini tingginya politik kekerabatan mengindikasikan lemahnya rekruitmen politik yang dilakukan oleh partai politik dalam proses penyeleksian kandidat. Jadi alih-alih partai politik sebagai kendaraan politik bagi perempuan untuk memperjuangkan kepentingannya justru sebaliknya perempuan terkesan menjadi komoditas untuk mendongkrak suara partai politik. Senada dengan itu berdasarkan penelitian Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol-UI) menyebutkan sekitar 40% calon legislatif perempuan yang lolos ke senayan pada tahun 2019 memiliki latar belakang politik kekerabatan dengan elite politik, pejabat negara atau kepala daerah (bbc.com).

Kondisi tersebut tidak sesuai dari harapan Phillips (1995) dimana perempuan sebagai "pesan" tidak bisa dipindahtangankan. Faktanya pesan dari keterwakilan perempuan sendiri dapat terdistorsi dengan politik kekerabatan, yakni pesan perempuan terpilih justru berupa kepentingan kelompok atau kerabat politik dan bukan kepentingan perempuan. Selain itu dampak dari rekrutmen yang buruk adalah kualitas representasi yang juga buruk atau dengan kata lain tidak menyerupai yang diwakilinya.

Oleh karena itu, alih-alih menunjukan jaminan proses rekrutmen partai politik terjahadap perjuangan kepentingan perempuan justru menegaskan transisi model partai massa menuju *catchall parties* dimana partai-partai politik mempertahankan keuntungan dirinya (keuangan dan elektoral) dengan mengorbankan fungsi-fungsi demokratis seperti sosialisasi, mobilisasi dan representasi (Dalton and Wattenberg 2000). *Catchall parties* juga lebih banyak berorientasi kepada kontestasi elektoral dan mengabaikan perjuangan ideologi, keanggotaan hanyalah sebagai pemandu sorak yang teorganisir (organized cheerleaders) untuk elit dan keanggotaannya terbuka untuk semua bahkan didorong (Katz and Mair 1995, 2009).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa keterwakilan dan kepentingan perempuan bukan kriteria utama dalam proses seleksi politik. Adapun budaya survei dalam proses rekrutmen selain memberikan peluang terhadap kandidasi calon perempuan juga menyuburkan politik kekerabatan karena selain memiliki modal capital, mereka juga satu langkah lebih maju dibanding perempuan lainnya dalam popularitas dan elektabilitas di masyarakat. Adapun isu perempuan yang diperjuangkan oleh Partai Nasdem sejauh ini masih belum teruji mengingat mayoritas calon perempuan didominasi latar belakang politik kekerabatan, selain itu kriteria utama adalah loyalitas terhadap partai politik bukan kepentingan perempuan itu sendiri. Alih-alih melihat capaian peningkatan wakil perempuan Partai Nasdem sebagai prestasi, penulis justru melihat isu perempuan masih menjadi komoditas politik ditengah-tengah maraknya *catchall parties* yang lebih beriorientasi terhadap kemenangan di pemilihan umum dan bukan ideologi partai. Selain itu, menempatkan keterwakilan dan kepentingan perempuan sebagai isu untuk menarik suara tanpa menjadikannya sebagai kriteria dalam rekrutmen ternyata merupakan strategi yang cukup berhasil. Sayangnya alih-alih strategi itu untuk memperjuangkan kepentingan perempuan secara kualitas justru lebih menyerupai strategi untuk peningkatan suara partai dalam pemilihan umum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengumpulan data, serta terima kasih kepada para narasumber yang sedia meluangkan waktu sehingga penelitian dan tulisan ini dapat selesai dengan baik.

BIBLIOGRAFI

- Aldrich, J. 1995. "Why Parties?: The Origin and Transformation of Political Parties in America." *Choice Reviews Online*. doi: 10.5860/choice.33-1805.
- Anggoro, Bayu. 2018. "Hanya NasDem Yang Tanpa Mahar." *Media Indonesia*. Retrieved November 15, 2020 (https://mediaindonesia.com/read/detail/147846-hanya-nasdem-yang-tanpa-mahar).
- Arnesen, Sveinung, and Yvette Peters. 2018. "The Legitimacy of Representation: How Descriptive, Formal, and Responsiveness Representation Affect the Acceptability of Political Decisions." *Comparative Political Studies*. doi: 10.1177/0010414017720702.
- Bachtiar, Luthfi Hasanal Bolqiah, and Saefudin Andrean. 2020. "Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta* 73–92.
- Burell, Barbara C. 1993. "Party Decline, Party Transformation and Gender Politics: The USA." in *Gender and Party Politics*, edited by J. Lovenduski and P. Noris. London: Sage.
- Cheibub, José Antonio. 2006. "Presidentialism, Electoral Identifiability, and Budget Balances in Democratic Systems." *American Political Science Review*.
- Dahlerup, Drude. 2013. Women, Quotas and Politics.
- Dalton, Russell J., and Martin P. Wattenberg. 2000. "Unthinkable Democracy: Political Change in Advanced Industrial Democracies." in *Parties Without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies*.
- Dewi, Kurniawati Hastuti. 2014. "Profil, Statuses, and Performance of Female Political Leaders: Impact Study of Direct Local Election." *Indonesian Feminist Journal* 13(1).
- Duverger, Maurice, and Maurice Duverger. 1972. "The Forms of Political Conflict." in *The Study of Politics*.
- Geddes, Barbara. 1966. *Politician's Dilemma: Building State Capacity in Latin America*. University California Press.
- Haris, Syamsudin. 2014. Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Htun, Mala N., and Mark P. Jones. 2002. "Engendering the Right to Participate in Decision-Making: Electoral Quotas and Women's Leadership in Latin America." in *Gender and the Politics of Rights and Democracy in Latin America*.
- Inglehart, Ronald, and Pippa Norris. 2003. *Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change around the World*.
- Inter-Parliamentary Union. 2020. "Monthly Ranking of Women in National Parliaments." Retrieved November 15, 2020 (https://data.ipu.org/women-ranking?month=10&year=2020).
- Katz, Richard S., and William Crotty. 2006. Handbook of Party Politics.
- Katz, Richard S., and Peter Mair. 1995. "Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party." *Party Politics*. doi: 10.1177/1354068895001001001.
- Katz, Richard S., and Peter Mair. 2009. "The Cartel Party Thesis: A Restatement." *Perspectives on Politics*. doi: 10.1017/S1537592709991782.
- Kenworthy, Lane, and Melissa Malami. 1999. "Gender Inequality in Political Representation: A Worldwide Comparative Analysis." *Social Forces*. doi: 10.1093/sf/78.1.235.
- Krook, Mona Lena. 2005. "Comparing Methods for Studying Women in Politics: Statistical, Case Study, and Qualitative-Comparative Techniques." in *Annual Meeting of the American Political Science Association Washington, DC, September, 2005.*
- Lawless, Jennifer L. 2009. "Sexism and Gender Bias in Election 2008: A More Complex Path for Women in Politics." *Politics and Gender*.
- Lawless, Jennifer L., and Richard L. Fox. 2005. It Takes a Candidate: Why Women Don't Run for Office.

- Lindberg, Staffan I. 2004. "Women's Empowerment and Democratization: The Effects of Electoral Systems, Participation, and Experience in Africa." *Studies in Comparative International Development*. doi: 10.1007/BF02686314.
- Linz, Juan J. 1994. "Presidential or Parliamentary Democracy? Does It Make a Difference?" The Failure of Presidential Democracy: The Case of Latin America.
- Maria, Ana, Liza Quintarti, and Gadi Djou. 2018. "Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik Dan Pemilu Serempak." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*.
- Matland, Richard E., and Donley T. Studlar. 1996. "The Contagion of Women Candidates in Single-Member District and Proportional Representation Electoral Systems: Canada and Norway." *Journal of Politics*. doi: 10.2307/2960439.
- Molyneux, Maxine. 2004. "Common Ground or Mutual Exclusion. Women's Movements and International Relations." *Gender, Work and Organization*. doi: 10.1111/j.1468-0432.2004.00256 1.x.
- Mondak, Jeffery J., and Mary R. Anderson. 2004. "The Knowledge Gap: A Reexamination of Gender-Based Differences in Political Knowledge." *Journal of Politics*. doi: 10.1111/j.1468-2508.2004.00161.x.
- Neuman, W. L. 2006. Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach, Sixth Edition. Norris, Pippa. 1997. "Conclusions: Comparing Passages to Power." in Passasges to power. Legislative recruitment in advanced democracies.
- Pak, Kyoungsan. 1995. "Partisanship, Institutions, and Change in American Trade Politics." *The Journal of Politics*. doi: 10.2307/2960405.
- Phillips, Anne. 1995. The Politics of Presence. USA: Oxford University Press.
- Rizki, Dwi Kurnia. 2017. "Pola Rekruitmen Partai Nasional Demokrat Pada Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Jombang." *Jurnal Politik Muda* 6(1):67–72.
- Sanbonmatsu, Kira. 2010. Where Women Run: Gender and Party in the American States.
- Scott, Ruth K., Paul K. Warr, and Giovanni Sartori. 1977. "Parties and Party Systems: A Framework for Analysis." *The Western Political Quarterly*. doi: 10.2307/447948.
- Soetjipto, Ani W. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soetjipto, Ani W., and Shelly Adelina. 2012. *Partai Politik Dan Stratego Gender Separuh Hati*. Jakarta: Parentesis.
- Soetomo. 2004. "Perspektif Teoritis Model Rekruitmen Perempuan Bidang Politik." *Mimbar* XXIII(2):178–94.
- Subono, Nur Iman. 2012. "Pengantar." in *Partai Politik dan Stratego Gender Separuh Hati*, edited by A. W. Soetjipto and S. Adelina. Jakrta: Parentesis.
- Supriyanto, D., and A. Mellaz. 2011. Ambang Batas Perwakilan, Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proporsionalitas Hasil Pemilu. Jakarta: Perludem.
- Tripp, Aili Mari, and Alice Kang. 2008. "The Global Impact of Quotas: On the Fast Track to Increased Female Legislative Representation." *Comparative Political Studies*. doi: 10.1177/0010414006297342.
- Tuasuun, Ghea Clarisa. 2015. "Kandidasi Perempuan Caleg Di Kota Surabaya Dalam Pemilihan Legislatif 2014." *Jurnal Politik Muda*.
- Verba, Sidney, Nancy Burns, and Kay Lehman Schlozman. 2001. *The Private Roots of Public Action: Gender, Equality, and Political Participation*. Cambridge: Cambridge University Press.